

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis berfungsi untuk pergantian atau kelanjutan sebuah pemerintahan termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu) yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sangat menentukan efektivitas dari proses penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu yang menjadi rumusan masalah adalah (1) Bagaimanakah peran dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum?; (2) Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019?. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Lahat. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi BAWASLU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Eksistensi Bawaslu Kab.Lahat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hasil kesimpulannya adalah (1) Peran dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah bersandarkan kedudukan dari jabatan berupa wewenang dan kewajiban, sementara fungsi merujuk pada tugas yang dipegang oleh posisi kedudukan tersebut, sehingga yang menjadi tugas dan fungsi Bawaslu adalah apa yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat pada Bawaslu bersandarkan pada tugas dan wewenang dan kewajiban Bawaslu. Untuk Bawaslu Kabupaten adalah pada merujuk pada merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Paragraf 3 Pasal 101 dan Pasal 102 mengenai tugas, Pasal 103 mengenai wewenang serta Pasal 104 mengenai kewajiban dari Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, a.Pendidikan dan Pengalaman dari Sumber Daya Manusia (SDM masih rendah, mulai dari Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan/desa sampai Panwaslu yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Lahat; b.Kurangnya Penguasaan aturan dan teknis normatif bagi Peserta Pemilu yang mencalonkan diri dalam Pemilu secara baik serta Pemahaman fungsi dari pengawas dan panitia penyeleenggara Pemilu di lapangan masih minim; c. Masyarakat yang berfikiran pragmatis saja bahwa Pemilu hanya pada saat penjoblosan saja dan tidak fokus pada program yang ditawarkan para calon wakil rakyat yang ikut

Pemilu; d.Keterbatasan pembiayaan dalam upaya peningkatan pengetahuan pendidikan politik masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Bawaslu, efektivitas

ABSTRACT

General Elections (Pemilu) as a means of implementing democratic popular sovereignty function for the replacement or continuation of a government, including in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The existence of an election supervisory agency (Bawaslu) which is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections is very important in determining the effectiveness of the election administration process. For this reason, the formulation of the problem is (1) What is the role and function of Bawaslu in organizing the General Election?; (2) What are the factors that affect the effectiveness of the Lahat Regency Bawaslu in Organizing the 2019 General Election?. The type of research in this thesis is field research conducted at the Bawaslu of Lahat Regency. The purpose of this research is to find out how the role and function of Bawaslu in organizing the General Election and to find out the factors that influence the existence of Bawaslu Kab.Lahat in the implementation of the General Election. The conclusion results are (1) The role and function of Bawaslu in organizing the General Election is based on the position of the position in the form of authority and obligation, while the function refers to the duties held by that position, so that the duties and functions of Bawaslu are what are the duties, authorities and obligations attached to Bawaslu rely on the duties and authorities and obligations of Bawaslu. For Regency Bawaslu, it refers to referring to the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections, namely in Paragraph 3 Article 101 and Article 102 regarding duties, Article 103 regarding authority and Article 104 regarding the obligations of Regency/City Bawaslu. (2) Factors that affect the effectiveness of the Lahat Regency Bawaslu in Organizing the 2019 General Election, a. Education and Experience of Human Resources (HR is still low, starting from the Election Supervisor (Panwaslu) and the Field Supervisory Committee (PPL) both at the level Subdistricts, Kelurahan/villages to Panwaslu in the Lahat Regency Polling Station (TPS); b. Lack of normative rule and technical mastery for Election Contestants who are running for elections in a good manner and understanding of the functions of supervisors and election organizing committees in the field is still minimal c. People who think pragmatically that the election is only at the time of voting and does not focus on the programs offered by candidates for people's representatives who take part in the election; d. Limited funding in an effort to increase knowledge of political education of the community and the parties involved in monitoring the

implementation Elections

Keywords: General Elections, Bawaslu, effectiveness